

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena Inflasi merupakan permasalahan klasik yang tidak dapat terlepas dari kehidupan perekonomian suatu negara. Adanya peristiwa krisis moneter Asia di tahun 1998 memunculkan kesadaran tersendiri bagi suatu negara bahwa sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter. Salah satu indikator makroekonomi yang digunakan suatu negara untuk mengidentifikasi stabilitas moneter dan perekonomiannya yakni melalui tingkat inflasi (Ginting, 2016).

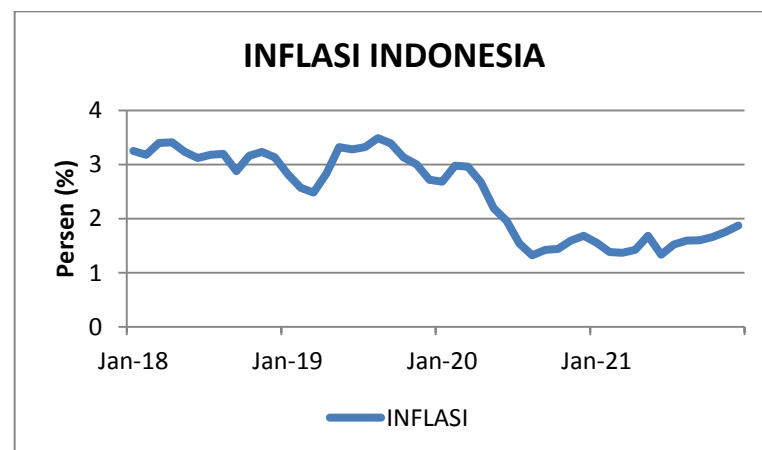
Menurut Sek et al., (2015) secara umum, inflasi merupakan suatu masalah yang penting dan harus segera ditangani, mengingat akan dampaknya dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan (agregat), khususnya pada negara-negara berkembang. Di sisi lain, permasalahan inflasi juga tidak dapat dihilangkan secara tuntas, namun hanya dengan mengendalikan atau menurunkan (Basorudin et al., 2019). Inflasi memiliki peran penting dalam berfungsinya kinerja ekonomi suatu negara secara sehat (Kahssay, 2017).

Salah satu negara berkembang yang tidak dapat terlepas dari permasalahan inflasi yakni negara Indonesia, bahkan hal tersebut merupakan target pemerintah sejak tahun 2000 (Basorudin et al., 2019). Mengacu pada data dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik bahwasanya tingkat inflasi di Indonesia lebih cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu. Pada dasarnya, penyebab inflasi adalah inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya,

Sedangkan Bank Sentral sendiri hanya mampu mengontrol dari aspek moneter saja seperti jumlah uang beredar (JUB), nilai tukar (kurs), suku bunga, dan produk domestik bruto (Setiartiti & Hapsari, 2019). Selain itu juga inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi dan non-ekonomi, baik itu yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung.

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Bank Indonesia, 2021). Sedangkan menurut Samuelson & Nordhaus (2004) mendefinisikan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadinya kenaikan tingkat harga secara umum. Artinya bahwa keadaan melemahnya daya beli masyarakat akan diikuti dengan penurunan atau berkurangnya nilai riil dari mata uang negara.

Berikut merupakan data inflasi Indonesia 2018 – 2021 yang di peroleh dari Bank Indonesia sebagai berikut:



Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi di Indonesia 2018 – 2021

Sumber : Bank Indonesia, 2022 (Data di Olah)

Pada gambar 1.1 menunjukkan perkembangan inflasi Indonesia dari tahun 2018 – 2021 yang cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 sebelum

adanya pandemi covid-19 angka inflasi masih bergerak secara terkendali yakni sebesar 3.23 persen. Inflasi terkendali pada tahun tersebut merupakan salah satu pendorong terapresiasinya nilai tukar rupiah hingga ke Rp. 13.300/dolar AS Meskipun pada saat itu harga bahan bakar minyak naik dan nilai tukar rupiah terpuruk hingga diatas Rp 15 ribu/dolar Amerika Serikat. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam meredam gejolak harga komoditas terutama harga pangan yakni melalui menaikkan suku bunga acuan yang mampu menjaga stabilitas pasar (Databoks, 2018).

Pada tahun kalender 2019 inflasi tercatat sebesar 2.72% yang lebih rendah dari tahun 2018. Menurut Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan bahwasanya tingkat inflasi yang berada dibawah target pemerintah sebesar 3.5 persen. Sedangkan pada 2021 bulan Agustus angka inflasi lebih tinggi dan mulai meningkat sedikit demi sedikit dari Juli 2021 yang sebesar 1.52%. Namun, angka tersebut lebih rendah dibandingkan pada Agustus 2020 yang hanya sebesar 1.32%, selain itu angka inflasi tersebut merupakan angka inflasi terendah. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang muncul sejak Maret 2020 dan menyebabkan daya beli dan pendapatan masyarakat menurun.

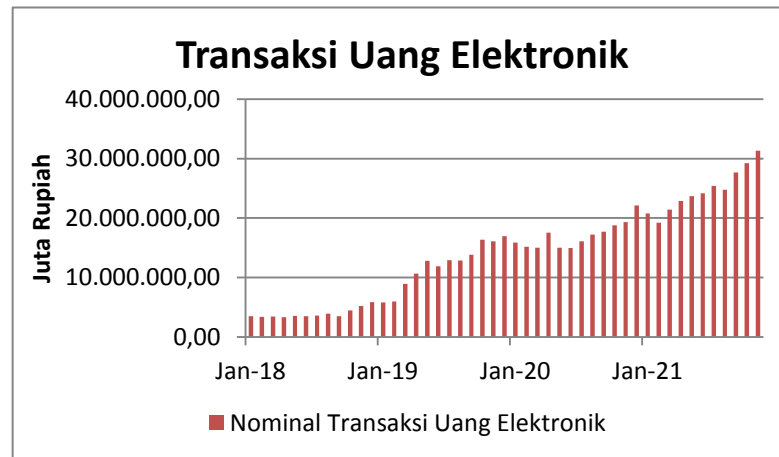
Sejak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian agregat negara terganggu. Salah satunya yakni pada angka inflasi indonesia yang merupakan titik terendah di tahun 2020 yang hanya sebesar 1,68% (yoy). Dimana angka tersebut berada dibawah target inflasi tahun 2020 sebesar 3.01% (Bank Indonesia, 2021). Dilansir dari berita kompas harian, bahwasanya hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum cukup kuat sebagai dampak dari pendemi Covid-19 ditengah pasokan yang memadai.

Selain itu banyaknya para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga secara tidak langsung menurunkan pendapatan masyarakat dan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat serta diikuti dengan melambatnya perputaran uang.

Perkembangan teknologi saat ini semakin mendorong perkembangan pada sistem pembayaran, khususnya di negara Indonesia. Adanya kemajuan teknologi dan di barengi dengan perubahan pada pola konsumsi masyarakat serta menuntut menggunakan pembayaran serba mobile mengakibatkan perkembangan yang cukup signifikan terhadap jumlah transaksi pembayaran non tunai atau digital. Adanya inovasi perbankan mulai menambah jenis pembayaran non tunai (*non cashless*) dengan menggunakan kartu antara lain ATM debit, ATM kredit dan uang elektronik (*electronic money*) (Fatmawati & Yuliana, 2019). Mengingat sifatnya yang cepat dan praktis sehingga pembayaran non tunai cukup digemari oleh masyarakat.

Penggunaan uang elektronik (*electronic money*) pasca adanya pandemi Covid-19 tentunya cenderung mengalami peningkatan khususnya jumlah uang elektronik yang beredar maupun dari nominal transaksinya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih cenderung bertransaksi secara online dan mengurangi aktivitas diluar rumah untuk mencegah penularan virus Covid-19. Sehingga dengan meningkatnya penggunaan *e-money* akan berpotensi mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB) yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap tingkat inflasi (Damayanti, 2020).

Berikut ini merupakan perkembangan transaksi uang elektronik pada periode 2018 – 2021:



Gambar 1.2 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik Indonesia 2018-2021

Sumber : Bank Indonesia, 2022 (Data Di Olah)

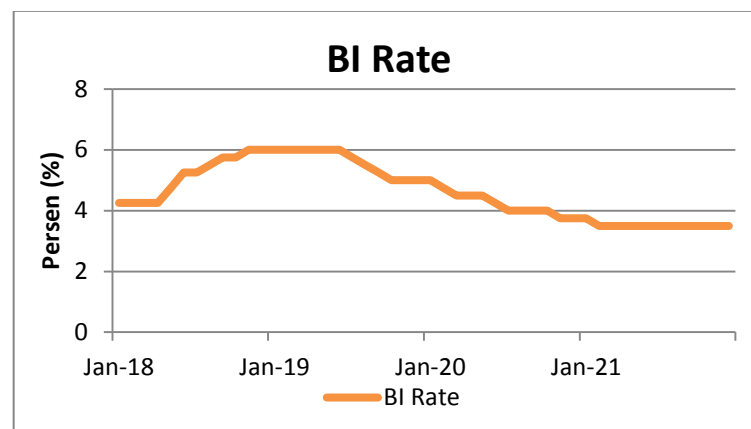
Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan perkembangan transaksi penggunaan uang elektronik di Indonesia periode 2018 – 2021, terlihat bahwasanya pergerakan transaksi uang elektronik cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebelum adanya pandemi covid-19 transaksi uang elektronik masih bergerak stabil dan hanya berkisar 3 sampai dengan 8 juta rupiah transaksi. Namun pasca adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 jumlah transaksi uang elektronik dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibanding dengan tahun sebelumnya.

Transaksi uang elektronik tertinggi terjadi pada akhir tahun 2021 yakni sebesar 312,977,57.7 Juta Rupiah. Adanya kenaikan yang cukup signifikan tersebut salah satunya karena adanya pandemi covid-19. Dimana masyarakat cenderung menggunakan uang elektronik (*electronic money*) dalam bertransaksi. Sedangkan transaksi uang elektronik terendah terjadi pada 2018 yakni 3,491,803 Juta rupiah.

Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan yang memiliki wewenang dalam menjaga kestabilan perekonomian terutama pada kestabilan nilai rupiah yang salah satunya melalui pengendalian inflasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan moneter dengan pengaturan suku bunga bank Indonesia. Karena dalam mencapai stabilitas inflasi merupakan salah satu langkah awal untuk mencapai stabilitas nasional.

Suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*) adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap laju inflasi. Dimana suku bunga ini merupakan salah satu patokan bagi perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunga. Sesuai pada penelitian yang dilakukan Basorudin et al., (2019) dan Kalalo et al., (2016) menerangkan bahwasanya variabel *BI Rate* mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap inflasi.

Berikut merupakan grafik suku bunga (*BI Rate*) periode 2018 – 2021:



Gambar 1.3 Perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia 2018 – 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022 (Data di olah)

Pada gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan suku bunga tertinggi terjadi pada akhir 2018 sampai dengan awal tahun 2019 yakni sebesar 6%. Pada periode sebelum adanya pandemi tahun 2018 hingga 2019 suku

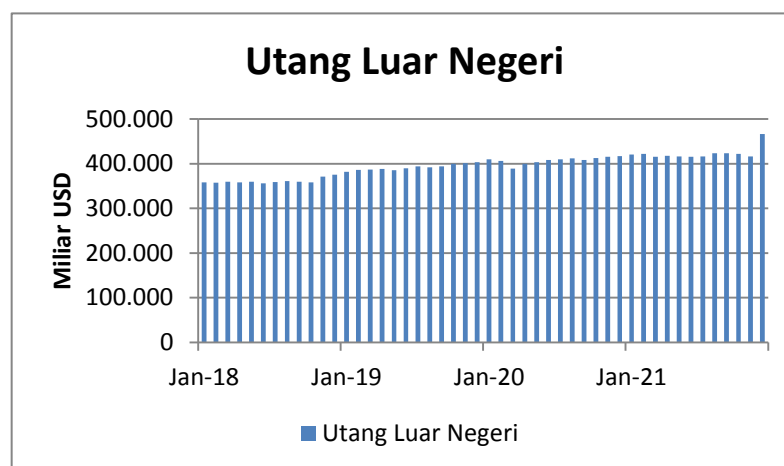
bunga berkisar sebesar 5 – 6 persen. Namun pasca adanya pandemi covid-19 tingkat suku bunga hanya berkisar 4 – 3 persen. Hal tersebut merupakan salah satu keputusan yang diambil pemerintah karena perkiraan inflasi yang tetap rendah dibawah titik tengah sasaran. Selain itu, guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik ditengah ekonomi global yang melambat serta untuk mengoptimalkan seluruh kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan (Bank Indonesia, 2021).

Ketika suku bunga tinggi masyarakat akan lebih cenderung memilih menyimpan uangnya di bank, dimana ada harapan pengembalian yang jauh lebih besar. Sehingga hal tersebut akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Sedangkan suku bunga terendah terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 3.5%. Dimana ketika suku bunga rendah masyarakat akan cenderung lebih memegang uangnya dalam bentuk tunai dan mengurangi jumlah tabungan. Sehingga dapat memicu kenaikan tingkat inflasi, dikarenakan meningkatnya konsumsi masyarakat dan peredaran uang yang cepat.

Pinjaman atau utang luar negeri merupakan sumber dana utama defisit fiskal (Rangkuty & Sari, 2019). Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo, perluasan pembangunan infrastruktur lebih banyak dicapai, dan hal ini menjadi perhatian. Maka dari itu kebijakan dalam pembiayaan infrastruktur tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah utang luar negeri pemerintahan. Sementara itu, posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia pada Agustus 2021 sebesar US\$ 423,5 miliar atau meningkat 2,7% (*year-on-year*) dari 1,7% (*year-on-year*) pada bulan sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan ULN pada sektor publik atau pemerintah dan Bank Sentral (Bank Indonesia, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rangkuty & Sari (2019) menyatakan bahwasanya utang luar negeri (ULN) berpengaruh terhadap laju inflasi. Kasus utang luar negeri (ULN) mampu mempengaruhi inflasi sekaligus fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga, dengan meningkatnya ULN secara terus-menerus mengakibatkan nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS, hal tersebut jika tidak segera dikendalikan akan memicu terjadinya inflasi impor. Sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar tidak menambah utang luar negeri yang memberikan efek buruk pada sektor lain.

Berikut merupakan data utang luar negeri negara Indonesia yang diperoleh dari website Bank Indonesia pada periode 2018 – 2021:



Gambar 1.4 Perkembangan Utang Luar Negeri Indonesia 2018 – 2021

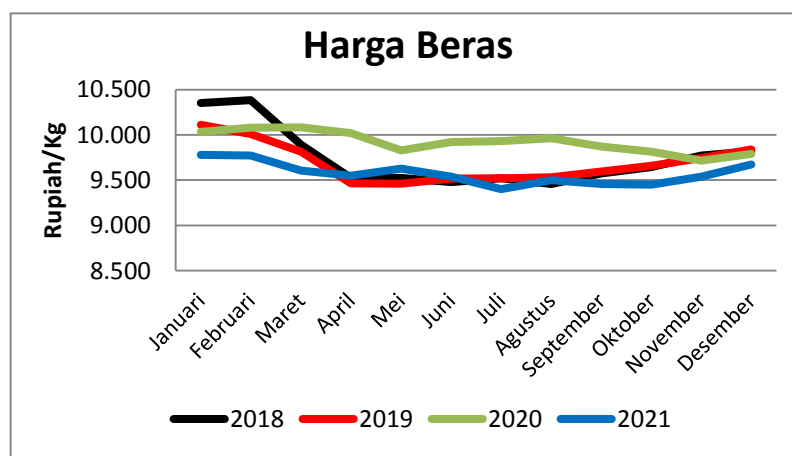
Sumber: Bank Indonesia (BI), 2022 (Data di Olah)

Berdasarkan gambar 1.4 menunjukkan perkembangan utang luar negeri Indonesia periode 2018-2021, dimana pergerakannya cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2018 utang luar negeri Indonesia sebesar 376,8 miliar atau tumbuh 6,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan utang tersebut bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah dan swasta. Dimana utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan

bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar (Bank Indonesia, 2018). Utang luar negeri pemerintah tertinggi terjadi pada akhir tahun 2021 yakni sebesar 446,830 miliar dolar. Sedangkan utang luar negeri terendah terjadi pada bulan Oktober 2018 sebesar 358,131 miliar dolar.

Selain faktor diatas adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi inflasi yakni harga beras. Beras merupakan pangan utama bagi bangsa Indonesia yang berperan sebagai komoditas ekonomi. Dengan implikasi ekonominya adalah ketika meningkatnya pendapatan masyarakat, maka akan diikuti dengan meningkatnya permintaan kuantitas dan kualitas pada beras. Sehingga ketika terjadi gejolak pada beras yang berkaitan dengan ketersediaan pasokan dan kenaikan harganya maka akan berdampak pada stabilitas perekonomian.

Berikut merupakan data rata- rata harga beras di tingkat penggilingan menurut kualitas premium periode 2018 – 2021:



Gambar 1.5 Perkembangan Harga Beras di Indonesia 2018 – 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2022 (Data di Olah)

Berdasarkan gambar 1.5 diatas menunjukkan perkembangan harga beras Indonesia dari tahun 2018 – 2021, dimana pergerakannya yang cenderung

berfluktuatif di setiap tahunnya. Puncak kenaikan tertinggi harga beras premium terjadi pada bulan Februari 2018. Dimana harga beras kualitas premium tercatat sebesar Rp. 10.382/Kg dari Januari 2018 sebesar Rp. 10.350/Kg. Menurut Suhariyanto, pada Maret dan April harga gabah akan turun karena adanya panen raya, sehingga harga beras akan turun dan diharapkan tidak berpengaruh pada inflasi Maret.

Sedangkan pada 2019 tepatnya di bulan Juli, harga rata-rata beras premium sebesar Rp. 9.519/Kg, dimana naik sebesar 0.04% dari bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 95.16/Kg. Kenaikan harga beras tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga gabah kering giling (GKG) dan harga gabah kering panen (GKP) (Badan Pusat Statistik, 2019). Sedangkan pasca adanya pandemi covid-19, harga beras pada Juli 2021 merupakan harga beras terendah yakni sebesar Rp.9.402/Kg.

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Basorudin et al., (2019) dan Setiartiti & Hapsari (2019). Pertama, penelitian ini menggunakan penambahan variabel baru dalam mengukur pengaruh inflasi di Indonesia baik dalam hubungan jangka pendek dan jangka panjang, serta menggunakan pandemi Covid-19 sebagai variabel dummy untuk membandingkan kondisi baik sebelum maupun setelah adanya pandemi Covid-19 (2018 – 2021). Mengingat, bahwasanya pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor baru yang dapat mempengaruhi kinerja perekonomian negara khususnya dalam melakukan aktifitas transaksi ekonomi. Kedua, objek periode waktu penelitian pada penelitian ini menggunakan kurun waktu Inflasi Indonesia dari bulan Januari 2018 sampai dengan November 2021.

Dikarenakan permasalahan inflasi merupakan permasalahan yang serius dan menyangkut berbagai aspek kinerja ekonomi secara makro apalagi ditengah adanya pandemi covid-19, sehingga perlu adanya pengendalian secara langsung agar stabil. Dalam hal ini kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi, maka dari itu perlu diidentifikasi faktor determinan apa saja yang berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2018 – 2021. Maka dari itu, melihat permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Determinan Inflasi di Indonesia Periode Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Apakah transaksi uang elektronik (*electronic money*) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah suku bunga bank Indonesia (BI Rate) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Apakah utang luar negeri berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Apakah harga beras berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
5. Apakah pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah diatas, sehingga tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transaksi uang elektronik (*electronic money*) terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga bank Indonesia terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh utang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh harga beras terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap inflasi di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor – faktor yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi di Indonesia. Selain itu juga sebagai bahan literatur dan informasi bagi pihak – pihak lain yang ingin melakukan penelitian secara mendalam mengenai tema yang sama.

2. Bagi Pembuat Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pemerintah dalam menangani dan mengambil kebijakan untuk menstabilkan laju inflasi di Indonesia.